



PARADOKS KEPATUHAN PAJAK UMKM INDONESIA: MODEL INTEGRATIF DAN IMPLIKASI PERGESERAN PARADIGMA KEBIJAKAN - A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

Fransiskus Daniawan, Totok Dewayanto¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6282135240978

ABSTRACT

This study diagnoses the dynamic mechanisms perpetuating tax non-compliance in Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) through an integrative conceptual model. Key variables examined include internal (capacity and literacy), external (incentives and administration), and psychosocial factors (tax morale and trust). A Systematic Literature Review (SLR) is employed to evaluate the effectiveness of traditional policies and formulate a novel relationship-centric framework.

Methodologically, the SLR follows the PRISMA protocol, utilizing the PICO framework for research questions. Literature searches were conducted in the Scopus database targeting open-access English journal articles published between 2021 and 2025. From an initial 791 records, the screening and data extraction process yielded 35 high-quality articles for in-depth synthesis.

The results confirm that MSME non-compliance is driven by a "Vicious Cycle of Non-Compliance", originating from low literacy and complex systems (e.g., utilization problems), which ultimately erodes taxpayer morale and trust. Personalized interventions and behavioral nudges proved significantly more effective than mere coercion. Therefore, sustainable solutions require a paradigm shift by tax authorities from an enforcement-centric to a relationship-centric model, redefining success metrics toward long-term psychological contract health.

Keywords: Tax Compliance, MSMEs, Non-Compliance Vicious Cycle, Fiscal Psychology, Systematic Literature Review.

PENDAHULUAN

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan entitas vital yang merepresentasikan denyut nadi perekonomian Indonesia. Secara historis, UMKM telah membuktikan resiliensinya sebagai bantalan ekonomi nasional. Namun, di tengah gemilangnya performa ekonomi tersebut, muncul sebuah anomali atau "Paradoks Fiskal". Terdapat diskrepansi yang tajam antara besarnya kontribusi UMKM terhadap PDB dengan rendahnya kontribusi mereka terhadap penerimaan pajak negara. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2024, dari sekitar 1,6 juta wajib pajak UMKM yang telah terdaftar, tercatat hanya kurang dari 40% (sekitar 635.000 entitas) yang secara aktif menyetorkan Pajak Penghasilan (PPH) Final.

Kesenjangan ini menciptakan ketidakadilan horizontal dalam sistem perpajakan dan menghambat optimalisasi pendapatan negara. Rendahnya kepatuhan pajak UMKM tidak dapat secara simplistik dituduh sebagai bentuk penggelapan pajak (*tax evasion*) yang disengaja. Fenomena ini merupakan manifestasi dari kegagalan sistemik yang menjerat pelaku usaha ke dalam "Lingkaran Setan Ketidapatuhan" (*Vicious Circle of Non-Compliance*). Siklus degradasi ini dimulai dari rendahnya literasi keuangan dan minimnya pemahaman regulasi, yang pada akhirnya mengikis moral pajak (*tax morale*) serta kepercayaan pelaku usaha terhadap otoritas.

Akselerasi ekonomi digital membawa tantangan tambahan berupa "Paradoks Digitalisasi". Digitalisasi administrasi pajak bertujuan untuk memudahkan wajib pajak, namun bagi UMKM dengan keterbatasan literasi teknologi, sistem ini justru menjadi dinding pemisah (*digital divide*) yang mengeksklusi mereka dari sistem perpajakan formal. Bukannya mempermudah, transisi

¹ Corresponding author

digital yang terlalu cepat tanpa pendampingan justru meningkatkan beban psikologis bagi pelaku UMKM tradisional.

Melihat kompleksitas masalah di atas, pendekatan ekonomi klasik yang hanya mengandalkan sanksi dan denda (model *deterrence*) terbukti tidak lagi memadai. Mayoritas penelitian terdahulu cenderung mengandalkan pendekatan *enforcement-centric*, sehingga menyisakan kesenjangan teoretis.

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan perpajakan saat ini dan merumuskan kerangka teoretis integratif yang mensinergikan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan Teori Psikologi Fiskal guna menciptakan pergeseran paradigma menuju pendekatan yang berorientasi pada pembangunan hubungan (*relationship-centric*).

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERTANYAAN PENELITIAN

Analisis kepatuhan pajak pada sektor UMKM merupakan fenomena multidimensional yang memerlukan landasan teoretis integratif. Penelitian ini mensintesis dua teori besar: *Theory of Planned Behavior* (TPB) pada ranah kognitif individu, dan *Fiscal Psychology Theory* (Teori Psikologi Fiskal) untuk menjelaskan dinamika relasional antara wajib pajak dengan negara.

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) berargumen bahwa prediktor terdekat dari perilaku manusia adalah niat (*intention*) individu untuk melakukan perilaku tertentu, yang merupakan indikasi seberapa keras orang bersedia mencoba dan merencanakan perilaku tersebut. Niat ini dapat diprediksi dengan tingkat akurasi tinggi karena dibentuk oleh tiga determinan utama: (1) Sikap terhadap perilaku, yakni pandangan UMKM terhadap pajak sebagai beban atau investasi; (2) Norma Subjektif, yakni tekanan atau ekspektasi dari lingkungan sosial; dan (3) *Perceived Behavioral Control* (PBC), yakni kendali perilaku yang dipersepsikan atau persepsi atas kemudahan dan kesulitan dalam mematuhi sistem perpajakan. Keterbatasan literasi akuntansi dan kompleksitas *e-Tax* secara signifikan menurunkan PBC pelaku UMKM, membuat mereka enggan patuh.

Teori Psikologi Fiskal (Slippery Slope Framework)

Slippery Slope Framework yang digagas oleh Kirchler (2007) menawarkan perspektif makro mengenai kepatuhan pajak melalui dua dimensi utama:

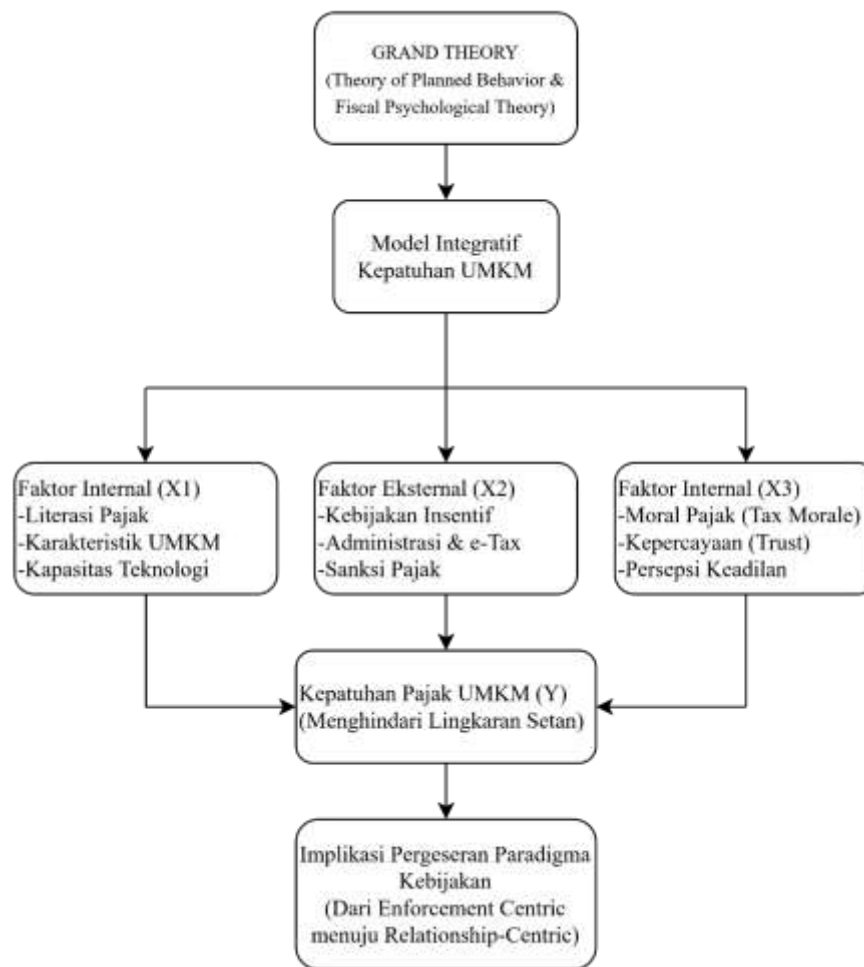
1. *Power of Authority* (Kekuasaan Otoritas): Mengandalkan paksaan (audit dan sanksi) yang hanya menciptakan "iklim antagonis" dan kepatuhan paksaan (*enforced compliance*) dalam jangka pendek.
2. *Trust in Authority* (Kepercayaan pada Otoritas): Mengedepankan keadilan, transparansi, dan edukasi. Tingkat kepercayaan yang tinggi membentuk "iklim sinergis" yang menstimulasi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) jangka panjang.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun berdasarkan alur logika yang mensinergikan pendekatan kognitif individu dan lingkungan administratif. Alur ini bermula dari *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang memposisikan sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku (seperti literasi pajak dan kapasitas teknologi) sebagai prediktor internal (X1) dari niat kepatuhan UMKM. Namun, niat ini tidak berdiri sendiri; ia secara dinamis dipengaruhi oleh faktor eksternal (X2) berupa sistem administrasi dan efektivitas kebijakan insentif, serta faktor psikososial (X3) berupa kepercayaan dan moral pajak yang dijelaskan melalui *Fiscal Psychology Theory* atau *Slippery Slope Framework*.

Interaksi yang kompleks antara ketiga kluster determinan inilah yang pada akhirnya menentukan apakah wajib pajak UMKM akan patuh atau justru tergelincir ke dalam "Lingkaran Setan Ketidapatuhan". Kesimpulan akhir dari kerangka ini bermuara pada gagasan bahwa kepatuhan pajak yang optimal dan berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila otoritas pajak menggeser paradigmanya dari pendekatan yang murni berfokus pada paksaan hukum (*enforcement-centric*) menuju pendekatan yang memprioritaskan pembangunan hubungan (*relationship-centric*).

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



Berdasarkan kerangka di atas, rumusan pertanyaan penelitian (RQ) yang diajukan adalah:

1. **RQ1:** Bagaimana faktor internal UMKM (karakteristik usaha, literasi pajak, kapasitas teknologi) mempengaruhi kepatuhan pajak?
2. **RQ2:** Sejauh mana kebijakan perpajakan (insentif) dan administrasi (sistem *e-Tax*) mempengaruhi kepatuhan UMKM?
3. **RQ3:** Bagaimana faktor psikososial dan behavioral (moral pajak, kepercayaan, norma sosial) mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Tinjauan Literatur Sistematis atau *Systematic Literature Review* (SLR) dengan mengadopsi kerangka PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*). Proses pencarian literatur difokuskan pada pangkalan data akademik global Scopus.

Kriteria Pemilihan Data

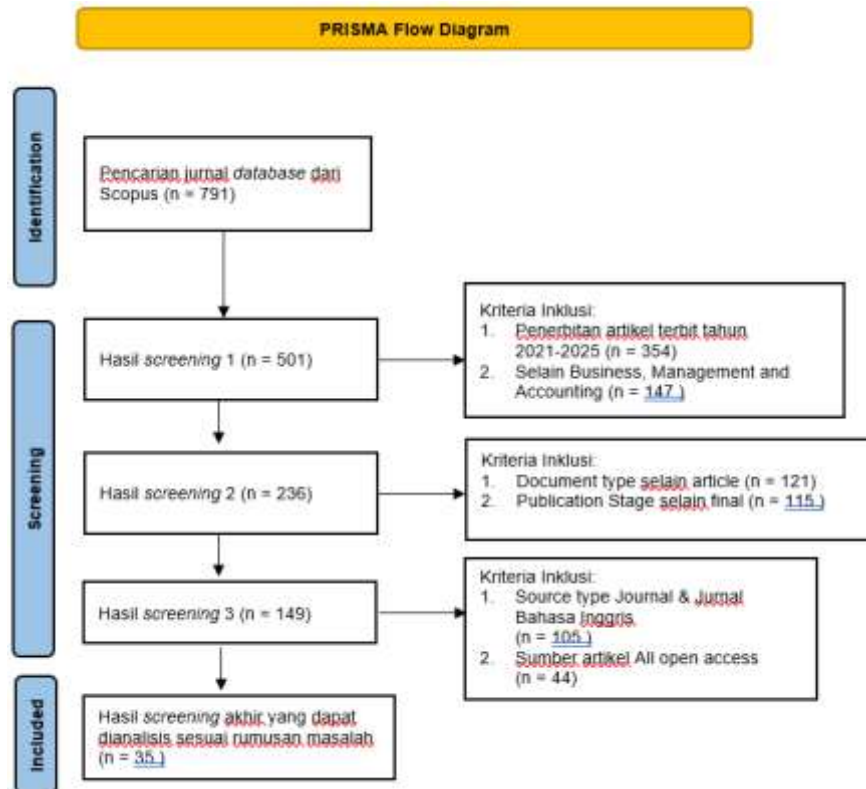
Strategi pencarian dirumuskan menggunakan pendekatan PICO (*Population, Intervention, Comparison, Outcome*). Pencarian literatur menggunakan *search string* Boolean berikut: ("*tax incentive*" OR "*tax sanction*" OR "*tax moral*" OR "*tax service*") AND ("*tax complian*") AND (*msme** OR *sme** OR *umkm** OR *taxpayer** OR "*small business*"* OR "*medium business*"*)*.

Adapun kriteria inklusi dalam penelitian ini dibatasi pada artikel yang diterbitkan dalam rentang waktu 5 tahun terakhir (2021-2025), termasuk dalam subjek *Economics, Business, and Management*, berjenis *open-access journal article*, dan menggunakan Bahasa Inggris.

Proses Ekstraksi Data (PRISMA)

Dari hasil identifikasi awal di *database* Scopus, ditemukan 791 artikel. Setelah melewati proses *screening* kelayakan (eksinklusi tahun terbit, jenis dokumen, dan bahasa), serta evaluasi teks penuh secara manual, penelitian ini berhasil mengekstraksi 35 artikel jurnal utama berkualitas tinggi yang sangat relevan untuk disintesis.

Gambar 2 PRISMA Flow Diagram



Sintesis temuan dari tinjauan sistematis ini dipaparkan berdasarkan tiga klaster utama yang menjawab masing-masing Pertanyaan Penelitian (RQ).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tinjauan terhadap 35 artikel utama, mayoritas studi menggunakan pendekatan kuantitatif (80%), dan lebih dari separuh penelitian mengambil latar belakang UMKM di Indonesia (51,4%). Hal ini menunjukkan bahwa temuan penelitian ini memiliki relevansi kontekstual yang sangat tinggi bagi otoritas domestik.

**Tabel 1
Karakteristik Literatur yang Dianalisis dalam SLR**

Karakteristik	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
Tahun Publikasi	2021	8	22.9
	2022	7	20.0
	2023	12	34.3
	2024	8	22.8

Metodologi Penelitian	Kuantitatif	28	80.0
	Kualitatif	4	11.4
	<i>Mixed Methods</i>	3	8.6
Lokasi Penelitian	Indonesia	18	51.4
	<i>Asia (Non-Indonesia)</i>	8	22.9
	Eropa	5	14.3
	Afrika	3	8.6
	Amerika	1	2.8
Fokus Tema Utama	<i>Tax Compliance</i>	15	42.9
	<i>Tax Incentives</i>	8	22.9
	<i>Digital Taxation</i>	6	17.1
	<i>Tax Morale</i>	4	11.4
	<i>Tax Administration</i>	2	5.7
Sampel Penelitian	UMKM/SME	25	71.4
	<i>Individual Taxpayers</i>	8	22.9
	<i>Corporate</i>	2	5.7

Faktor Internal UMKM (Menjawab RQ 1)

Analisis komprehensif terhadap faktor-faktor internal menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya (*resource availability*) dan pengembangan kapabilitas menjadi saringan utama postur kepatuhan UMKM. Berdasarkan pandangan berbasis sumber daya, ukuran dan usia UMKM berperan krusial; UMKM berskala lebih besar umumnya memiliki kapasitas finansial dan manajerial yang lebih baik untuk menanggung biaya kepatuhan (*compliance costs*). Sebaliknya, usaha berskala mikro seringkali masih berfokus pada mode bertahan hidup (*survival mode*), sehingga urusan administrasi perpajakan kerap dikesampingkan karena keterbatasan sumber daya.

Selain karakteristik fisik usaha, literasi dan pemahaman perpajakan terbukti memiliki efek yang sangat fundamental. Pengetahuan perpajakan, khususnya terkait pemahaman tarif dan prosedur, terbukti esensial dalam mencegah terjadinya ketidakpatuhan yang tidak disengaja (*unintentional non-compliance*). Jika ditinjau melalui lensa *Theory of Planned Behavior* (TPB), peningkatan literasi pajak ini secara langsung bermuara pada penguatan *Perceived Behavioral Control* (PBC) wajib pajak. Pelaku UMKM yang teredukasi merasa lebih mampu, mandiri, dan berdaya dalam memenuhi kewajibannya tanpa rasa takut yang berlebihan terhadap sanksi otoritas pajak.

Lebih lanjut, kapasitas administrasi digital menciptakan efek ambang batas (*threshold effects*). Bagi UMKM yang berada di bawah garis kesenjangan digital (*digital divide*), sistem administrasi elektronik justru dipersepsikan sebagai kompleksitas baru yang menakutkan, yang berisiko mengeksklusi mereka kembali ke dalam ekonomi bayangan (*shadow economy*).

Kebijakan Perpajakan dan Administrasi E-Tax (Menjawab RQ 2)

Efektivitas kebijakan perpajakan, khususnya instrumen insentif pajak, memainkan peran krusial dalam menjaga keberlanjutan operasional UMKM di masa krisis makroekonomi. Namun, efektivitas insentif ini memiliki ketergantungan kontekstual yang tinggi. Hosono dan Hotei (2023) menyoroti anomali yang disebut sebagai "masalah pemanfaatan" (*utilization problem*), di mana insentif berisiko gagal merangsang kepatuhan jika prosedur klaim administrasinya dirasa terlalu rumit.

Oleh karena itu, insentif pajak harus selalu diiringi dengan kualitas sistem elektronik (*e-Tax*) yang mumpuni. Studi membuktikan bahwa implementasi sistem *e-Tax* yang andal, efisien, dan aman dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak secara signifikan, yang pada gilirannya menekan praktik penggelapan pajak serta mengamankan penerimaan negara.

Faktor Psikososial dan Kultural (Menjawab RQ 3)

Analisis literatur secara absolut mengonfirmasi bahwa kepercayaan terhadap otoritas (*trust in authority*) dan moralitas pajak (*tax morale*) merupakan elemen esensial penciptaan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Pendekatan yang murni berfokus pada paksaan hukum (*deterrence*) seringkali gagal menciptakan kepatuhan yang berkelanjutan; dampaknya harus dimediasi secara penuh oleh moral pajak yang kuat di tengah masyarakat.

Menariknya, pembentukan moral pajak ini sangat dipengaruhi oleh norma kultural, religiusitas, dan keselarasan ideologis. Di Indonesia, internalisasi kearifan budaya lokal, seperti filosofi *Tri Hita Karana*, terbukti memotivasi wajib pajak secara intrinsik dan menekan niat penggelapan pajak secara drastis. Sebaliknya, faktor sosiokultural tertentu seperti orientasi ideologi patriarki yang kuat di tengah masyarakat justru terbukti mengikis tingkat moral pajak warga negara. Selain itu, kepatuhan juga dipengaruhi secara signifikan oleh ekspektasi rekan sejawat (*peer influence*) dan persepsi keadilan (*perceived justice*) atas tata kelola dana publik. Oleh karenanya, otoritas pajak dituntut untuk menggunakan intervensi personal (*behavioral nudges*), seperti komunikasi yang empatik, yang terbukti lebih efektif menumbuhkan kepatuhan jangka panjang dibandingkan sekadar mengirimkan ancaman denda.

Tabel 2
Sintesis Temuan Kunci Determinan Kepatuhan Pajak UMKM

Kategori Faktor	Variabel	Arah Hubungan	Temuan Kunci / Mekanisme Pengaruh	Referensi Pendukung Utama
Internal (Kapasitas UMKM)	Karakteristik Usaha (Ukuran & Usia)	Positif	UMKM dengan skala omzet lebih besar dan usia lebih matang memiliki kepatuhan lebih tinggi karena didukung oleh sumber daya finansial dan	Ratnawati dkk. (2023); Basri dkk. (2023)



			manajerial yang memadai untuk menanggung biaya kepatuhan (<i>compliance costs</i>).	
	Literasi & Pemahaman Pajak	Positif & Sangat Konsisten	Pengetahuan atas tarif dan prosedur menekan risiko ketidakpatuhan yang tidak disengaja. Pemahaman pajak secara langsung meningkatkan Kontrol Perilaku (<i>Perceived Behavioral Control</i>) wajib pajak.	Anto dkk. (2021); Dey (2023); Putri dkk. (2024)
	Kapasitas & Akses Teknologi	Positif	Kemampuan adaptasi teknologi memfasilitasi penggunaan sistem pajak digital. Sebaliknya, "kesenjangan digital" (<i>digital divide</i>) bertindak sebagai hambatan (berpengaruh negatif) terhadap niat patuh UMKM.	Nguyen (2023); Rupeika-Apoga dkk. (2022)
Eksternal (Sistem & Regulasi)	Kebijakan Insentif Pajak	Positif (Moderat)	Insentif sangat membantu menjaga likuiditas dan kelangsungan hidup UMKM di masa krisis. Namun,	Kurniawan dkk. (2023); Deyganto (2022); Hosono



			efektivitasnya sering terhambat oleh prosedur klaim yang rumit (Masalah Pemanfaatan / <i>Utilization Problem</i>).	& Hotei (2023)
	Kualitas Layanan & Implementasi E-Tax	Positif & Konsisten	Digitalisasi dan kemudahan sistem elektronik menekan peluang penggelapan pajak serta secara signifikan meningkatkan kepuasan wajib pajak, yang berujung pada peningkatan ketaatan.	Devano dkk. (2023); Otekunrin dkk. (2021); Nguyen (2023)
	Sanksi & Kekuasaan Otoritas (Power)	Positif (Jangka Pendek)	Sanksi dan denda menciptakan efek jera, namun hanya menghasilkan kepatuhan paksaan (<i>enforced compliance</i>). Efektivitas jangka panjangnya sangat terbatas jika tidak diimbangi dengan edukasi.	Al-Maghrebi dkk. (2022); Erasashanti dkk. (2024)
Psikososial & Behavioral	Moral Pajak (Tax Morale)	Positif & Sangat Konsisten	Motivasi intrinsik tertinggi bagi UMKM untuk tidak menggelapkan pajak. Moral pajak sangat dipengaruhi oleh nilai budaya (lokal),	Parwati dkk. (2021); Erina dkk. (2024); Hassan dkk. (2021)

			religiusitas, dan keselarasan ideologis dengan pemerintah.	
	Persepsi Keadilan (Perceived Justice)	Positif & Konsisten	Persepsi bahwa sistem pajak bebas dari diskriminasi sangat menurunkan niat penghindaran pajak. Ketidakadilan memicu retaliasi wajib pajak.	Pahala dkk. (2022); Bobek dkk. (2024)
	Kepercayaan (Trust in Authority)	Positif & Sangat Konsisten	Kepercayaan memediasi dan meredam efek negatif dari pendekatan koersif (sanksi). Hubungan personal yang transparan menumbuhkan iklim sinergis dan kepatuhan sukarela (<i>voluntary compliance</i>).	Abu Bakar dkk. (2022); Al-Maghrebi dkk. (2022); Ortega & Scartascini (2021)

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Bagian ini berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian kedepannya.

Kesimpulan

Penelitian ini membuktikan bahwa kepatuhan pajak UMKM merupakan fenomena multidimensional yang memerlukan pendekatan integratif. Ketidakpatuhan UMKM didorong oleh sebuah siklus negatif ("Lingkaran Setan Ketidakpatuhan") yang berawal dari rendahnya literasi dan rumitnya sistem (*utilization problem*), yang kemudian mengikis moral pajak dan kepercayaan wajib pajak. Kepatuhan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila otoritas pajak menggeser paradigma dari *enforcement-centric* (pendekatan paksaan) menjadi *relationship-centric* (pendekatan berbasis hubungan), dengan mengubah metrik evaluasi dari sekadar target penerimaan jangka pendek menjadi tingkat kesehatan kontrak psikologis jangka panjang antara negara dan pelaku usaha.

Keterbatasan

Dalam penelitian ini ditemukan adanya beberapa keterbatasan yang didapatkan, diantaranya:

1. Keterbatasan Generalisasi Lintas Negara (*Cross-Country Applicability*): Mengingat penggunaan pangkalan data global, terdapat porsi literatur yang cukup besar (48,6%) yang

meneliti ekosistem UMKM di luar yurisdiksi Indonesia. Hal ini membatasi adopsi rekomendasi kebijakan secara langsung ke dalam kerangka domestik tanpa melalui penyesuaian empiris lokal, mengingat setiap negara memiliki arsitektur regulasi dan kondisi makroekonomi yang berbeda.

2. Keterbatasan Metodologis: Mayoritas penelitian terdahulu yang dikaji masih sangat bergantung pada desain potong-lintang (*cross-sectional*) dan data yang dilaporkan sendiri oleh responden (*self-reported measures*) melalui kuesioner. Pendekatan ini rentan terhadap social desirability bias (bias keinginan sosial) di mana pelaku UMKM cenderung melebih-lebihkan tingkat kepatuhan mereka agar terlihat baik secara normatif.
3. Bias Representasi Geografis dan Sektoral: Studi mengenai kepatuhan UMKM di Indonesia saat ini masih bersifat Java-centric (terpusat di wilayah perkotaan dan Pulau Jawa) dan sangat didominasi oleh unit analisis di sektor perdagangan atau ritel. Hal ini menciptakan kesenjangan representasi bagi UMKM yang beroperasi di wilayah perdesaan, kawasan Indonesia Timur, daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), serta sektor krusial lainnya seperti agrikultur dan perikanan.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian dan mempertimbangkan keterbatasan pada penelitian ini, terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya antara lain:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya (Pengembangan Metodologi): Disarankan untuk mengadopsi desain riset longitudinal (*time-series*) guna menangkap dinamika perilaku kepatuhan UMKM secara lebih akurat dan *real-time*. Selain itu, peneliti di masa depan perlu mengurangi ketergantungan pada kuesioner dengan mulai menggunakan data kepatuhan objektif yang riil dari otoritas pajak (DJP) untuk menghindari bias laporan mandiri.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya (Perluasan Cakupan Penelitian): Riset di masa depan harus memperluas wilayah penelitian ke daerah perdesaan, luar Pulau Jawa, serta daerah 3T agar hasil penelitian dapat merepresentasikan kondisi struktural UMKM secara utuh secara nasional. Eksplorasi juga harus diarahkan untuk mencakup sektor agrikultur dan perikanan, serta mengintegrasikan kajian mengenai UMKM yang bertransisi dari sektor ekonomi informal (*shadow economy*).
3. Bagi Otoritas Perpajakan (Regulator): Pemerintah disarankan untuk segera mengimplementasikan *Customer Relationship Management* (CRM) khusus UMKM dan melakukan penyederhanaan sistem administrasi digital (e-Tax) secara inklusif. Transisi dari paradigma *enforcement-centric* menuju *relationship-centric* juga menuntut penerapan intervensi perilaku (*behavioral nudges*) melalui komunikasi yang lebih personal dan disesuaikan dengan nilai, norma, serta dinamika sosiokultural masyarakat setempat.

**REFERENSI**

- Abu Bakar, M.A., Palil, M.R., Maelah, R., & Ali, M.H. (2022). Power of Tax Authorities, Tax Morale, and Tax Compliance: A Mediation Analysis in East Malaysia. *Asian Journal of Business and Accounting*.
- Al-Maghrebi, M. S., Sapiei, N. S., & Abdullah, M. (2022). Power, Trust and Transparency as Determinant Factors of Tax Compliance: A Systematic Review. *Journal of Tax Reform*.
- Anto, L.O., Husin, Hamida, W., & Bulan, N.L. (2021). Taxpayer awareness, tax knowledge, tax sanctions, public service accountability and taxpayer compliance. *Accounting*.
- Basri, Y.M., Natariasari, R., & Devitarika, B. (2023). MSMEs Tax Compliance in Indonesia During Pandemic COVID-19: The Role of Risk Preference as Moderation. *Journal of Tax Reform*.
- Bobek, D., et al. (2024). Are Fairness Perceptions Related to Moral Licensing Behavior, Evidence From Tax Compliance. *Journal of Business Ethics*.
- Devano, S., Mulyani, S., Winarningsih, S., & Ghani, E.K. (2023). Tax officers' perceived relationship of e-taxation use, taxpayer satisfaction and taxpayer compliance. *Asian Economic and Financial Review*.
- Dey, S.K. (2023). Taxpayers' Perceptions Towards Income Tax Administration: A Study from Indian Perspectives. *Journal of Tax Reform*.
- Erina, L., Saptawan, A., & Martina. (2024). Patriarchy, economic values, and tax morale in Indonesia. *International Journal of Public Policy and Administration Research*.
- Hosono, K., & Hotei, M. (2023). Causal effects of a tax incentive on SME capital investment. *Small Business Economics*.
- Kurniawan, Maulana, A., & Iskandar, Y. (2023). Tax Incentive Policy and Recovery of SMEs in the post-COVID Period: The Moderating Role of Perceived Policy Effectiveness in Indonesia. *Journal of Tax Reform*.
- Nguyen, T.M.P. (2023). Determinants influencing the satisfaction of firms towards electronic tax (eTax) service in an emerging market. *Corporate Governance and Organizational Behavior Review*.
- Ortega, D., & Scartascini, C. (2021). Who's calling? The effect of phone calls and personal interaction on tax compliance. *Economics Letters*.
- Otekunrin, A.O., dkk. (2021). E-tax system effectiveness in reducing tax evasion in Nigeria. *Problems and Perspectives in Management*.
- Parwati, N.M.S., dkk. (2021). The effect of tax morale on tax evasion in the perspective of Tri Hita Karana and tax framing. *Accounting*.
- Ratnawati, V., Rusli, R., & Wahyuni, N. (2023). Determinants of tax compliance of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Pekanbaru, Indonesia. *Problems and Perspectives in Management*.